



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 864 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1876/2012 TENTANG PENETAPAN
LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU DI JALAN GINTUNG RT 08, RT 09
DAN RT 011, RW 02, KELURAHAN TANJUNG BARAT, KECAMATAN JAGAKARSA,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1876/2012, telah ditetapkan lokasi untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jalan Gintung RT 08, RT 09 dan RT 011, RW 02, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - b. bahwa kegiatan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum selesai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012, oleh karena itu akan dilanjutkan dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013, sehingga Keputusan Gubernur Nomor 1876/2012, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1876/2012 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Jalan Gintung RT 08, RT 09 dan RT 011, RW 02, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
13. Keputusan Gubernur Nomor 1876/2012 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Jalan Gintung RT 08, RT 09 dan RT 011, RW 02, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1876/2012 TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU DI JALAN GINTUNG RT 08, RT 09 DAN RT 011, RW 02, KELURAHAN TANJUNG BARAT, KECAMATAN JAGAKARSA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1876/2012 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Jalan Gintung RT 08, RT 09 dan RT 011, RW 02, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan diubah sebagai berikut :

a. Ketentuan diktum KELIMA diubah, sehingga diktum KELIMA berbunyi sebagai berikut :

KELIMA : Apabila bidang tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, sudah dibebaskan dan dikuasai sepenuhnya, Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib segera menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut dokumen kepemilikannya kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling lambat pada akhir Tahun Anggaran 2013, untuk dicatat sebagai aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- b. Ketentuan diktum KEDELAPAN diubah, sehingga diktum KEDELAPAN berbunyi sebagai berikut :

KEDELAPAN : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2013

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, ♀



JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
8. Plt. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Plt. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota
Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Camat Kecamatan Jagakarsa
16. Lurah Kelurahan Tanjung Barat